

## Literatur review transparansi dan akuntabilitas di Indonesia selama satu dekade: Studi bibliometric

Silvia Dewi\*, Wahyu Widarto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

\*Corresponding author: [silviadewi414@gmail.com](mailto:silviadewi414@gmail.com)

---

### Abstract

*This research aims to look at the implementation of transparency and accountability in Indonesia for a decade. The research method used is bibliometrics using the VOSViewer tool. Through an inclusion and exclusion process, this research examined 114 articles indexed in Scopus in the period 2013-2023. The research results show that the variables that have been frequently studied over the past ten years are related to transparency and accountability that is participation, good governance, and corruption. Transparency and accountability are principles in realizing good governance and open government. Public participation is a means of reviewing and monitoring government performance in preventing corruption. This research shows that the topic of transparency and accountability always develops every year so it will be interesting to research.*

*Keywords: transparency, accountability, good governance, corruption*

---

### PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintah khususnya pada pemerintah daerah maupun desa sering menjadi sorotan dari masyarakat. Berdasarkan data pada *world government index* (WGI) tahun 2021 menilai keefektifan pemerintah di Indonesia pada skor 65,38 dari nilai maksimal 100. Skor tersebut menunjukkan bahwa keberjalanan tata kelola belum dilakukan maksimal. WGI menilai keefektifan pemerintah dari indikator menangkap persepsi kualitas pelayanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat kemandiriannya dari tekanan politik, kualitas kebijakan formulasi dan implementasi, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

Tantangan yang sedang dihadapi oleh sektor publik yaitu dari penyediaan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kinerja yang telah dilakukan. Pelaporan dibuat dalam bentuk laporan keuangan yang telah dilengkapi oleh pengungkapan yang tepat sehingga diharapkan tidak terjadi informasi yang bias. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dapat disebut salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah maupun desa. Menurut Iyoha (2012) laporan keuangan memiliki kriteria utama yaitu ketepatan waktu, keandalan, dan komparabilitas. Penyediaan informasi oleh pemerintah digunakan untuk memantau akuntabilitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dilengkapi dengan pengungkapan yang tepat sehingga dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu ketepatan waktu, keandalan dan komparabilitas (Iyoha, 2012). Menurut Azahari, dkk (2021) ketepatanwaktuan pada sektor publik masih tergolong sedikit terutama di Indonesia, selain itu beberapa mengandung inkonsistensi hasil.

Indonesia saat ini menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi sehingga masing-masing daerah memiliki otonomi sendiri terkait pengelolaan wilayahnya. Hal itu tertuang pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, Permendagri nomor 77 tahun 2020, dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang RI No.06 Tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri No.83, 113 dan 114, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014. Namun, ditemukan bahwa ada penerapan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, fenomena rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah juga tercermin dari masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik daerah. Sutaryo & Amanu (2020) mengungkapkan kepala daerah petahana cenderung lebih banyak menyampaikan

informasi sebagai upaya menarik simpati masyarakat untuk kembali memimpin daerahnya. Pada tahun 2022 tingkat korupsi Indonesia mengalami penurunan skor menjadi 34 dari 100 yang sebelumnya di 2021 mendapat skor 38 ([www.transparency.org](http://www.transparency.org) diakses pada tanggal 13 Oktober 2023). Hal itu dapat menunjukkan transparansi pemerintah yang rendah membuat maraknya terjadi korupsi oleh pemerintah.

Transparansi selalu akan berkaitan dengan akuntabilitas, karena akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan menjelaskan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Meskipun praktik akuntabilitas telah dibangun dengan baik, namun mekanisme sering tidak dipatuhi oleh pelaksana program. Menurut Gayatri, dkk (2017) kondisi tidak terlaksananya akuntabilitas dengan baik berakibat rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penerapan *good governance* ditujukan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsep *good governance* semakin diisyaratkan untuk dilaksanakan pemerintah seiring dengan adanya reformasi yang menumbuhkan otonomi daerah. Dari beberapa prinsip *good governance* yang digunakan berbagai institusi pemerintahan, terlihat bahwa prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi institusional. Diantara berbagai indikator *good governance*, setidaknya terdapat sejumlah prinsip yang disepakati oleh institusi dan diakui sebagai karakteristik *good governance* diantaranya yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena terdapat hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi (CUI-ITB, 2004). Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan dalam memetakan struktur konseptual arah penelitian dengan menyajikan gambaran tren topik berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Good Governance*

*Good governance* didefinisikan sebagai praktik pembangunan yang bijaksana dan bertanggung jawab atas pengelolannya sesuai dengan prinsip demokrasi, termasuk menghindari alokasi dana yang tidak sesuai. *Good governance* menjunjung kepentingan nilai di masyarakat dalam mencapai tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial (Atiningsih dan Ningtyas, 2019). *Good governance* merupakan bagian dari pengelolaan pembangunan yang efektif dan efisien. Menurut Hakim, dkk (2022) implementasi *good governance* harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemerintah. Penerapan *good governance* yang demokratis dan efektif akan mampu mencapai realisasi kebijakan dalam pembangunan.

### Akuntabilitas

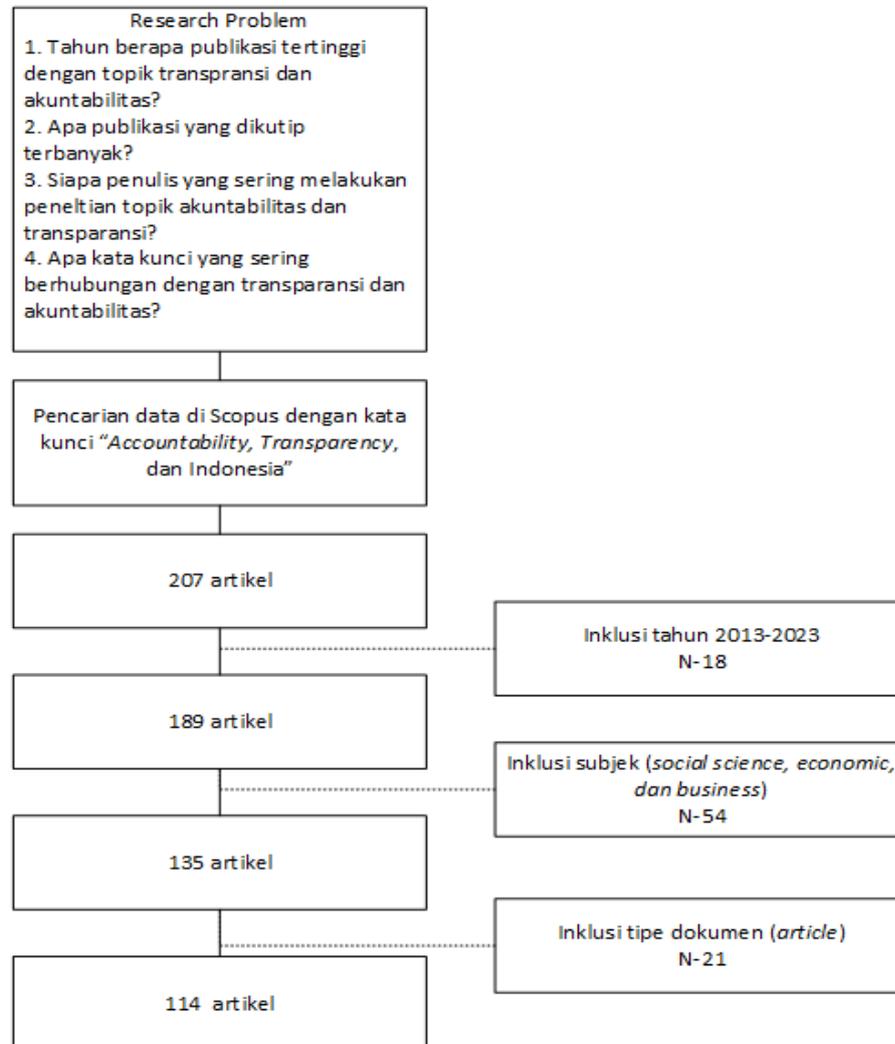
Akuntabilitas menjadi salah satu kunci yang merupakan unsur pokok untuk mewujudkan *good governance*. (Abdullah, 2010). Akuntabilitas juga telah menjadi topik yang menarik bagi pemerintahan, karena akuntabilitas telah berkembang dari sifat tradisional (akuntabilitas keuangan) menjadi beberapa prinsip, yaitu akuntabilitas administrasi, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas sosial (Saarikallio & Erkkila, 2007). Pada keberjalanannya akuntabilitas pemerintah harus mencakup enam indikator yaitu masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak (Adisasmita, 2014). Di Indonesia akuntabilitas dirancang dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja.

### Transparansi

Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi *good governance*. Melalui informasi sebagai bentuk transparansi dan mudah diakses akan memudahkan publik untuk memahami serta berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik. Menurut Risyah dan Idang (2017) transparansi memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi keuangan dan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Bentuk transparansi bisa dalam bentuk publikasi laporan keuangan di web pemerintah, sosialisasi kepada masyarakat apabila ada pencairan dana, dan pemasangan balihho laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan metode pada penelitian ini menggunakan sumber Tranfield et, al. (2003) dalam menggunakan tinjauan literatur sebagai alat untuk menyelidiki tren saat ini dan masa depan yang menjadi alasan penelitian dilakukan. Tujuan mendasar dari bibliometrik yaitu merangkum tinjauan paling kritis dari literatur yang relevan, memahami penelitian sebelumnya di bidang tertentu, dan memperkirakan masa depan terkait isu yang berkembang.



**Gambar 1.** Prosedur Metode Penelitian

Sumber: Data yang diolah, 2023

Gambar 1 menggambarkan prosedur metodologi yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian ini. Pertama, dilakukan pencarian di Scopus dengan kata kunci “*transparency*”, “*accountability*” dan “Indonesia” menghasilkan database 207 artikel. Kedua, dibatasi pada rentang waktu 2013-2023 maka artikel tersaring menjadi 189 artikel. Ketiga, artikel disaring menggunakan batasan subject area yaitu *Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Business, Management and Accounting* menjadi 135 artikel. Tahap terakhir yaitu artikel di inklusi menurut jenis dokumen yaitu hanya jenis artikel saja yang digunakan sehingga artikel tersisa 114 artikel.

## PEMBAHASAN

### Analisis Jumlah Publikasi per tahun

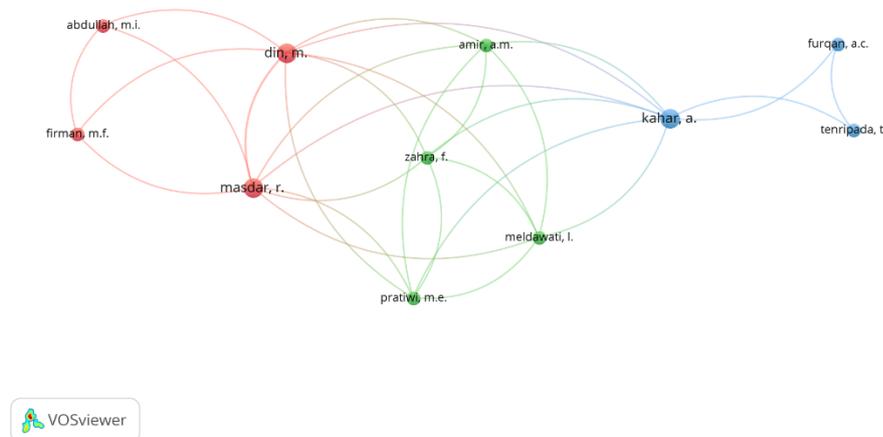


**Gambar 2.** Jumlah Publikasi Per Tahun

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui dalam kurun waktu 2013-2023 publikasi tertinggi yaitu tahun 2022 dengan jumlah 21 publikasi artikel mengenai akuntabilitas dan transparansi di Indonesia. Publikasi terbanyak diikuti pada tahun 2023 sebanyak 20 artikel. Terkecil pada tahun 2013-2015 masing-masing 2 artikel. Berdasarkan grafik topik akuntabilitas dan transparansi masih menarik untuk diteliti karena terlihat selalu ada peningkatan setiap tahun. Tahun 2022 mengalami kenaikan publikasi tertinggi karena adanya anggaran darurat terhadap penanganan COVID-19 yang menuntut bentuk transparansi dan akuntabilitas khususnya pemerintah daerah.

### Analisis Penulis dan Sitasi Artikel



**Gambar 3.** Penulis

Sumber: Data yang diolah, 2023

Gambar 3 menggambarkan hubungan antar penulis yang selalu menulis artikel dengan topik transparansi dan akuntabilitas. Cluster 1 yaitu Abdullah, Din, Firman, dan Masdar. Abdullah et, al. (2022) meneliti tentang anteseden akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan hasil pengawasan anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan audit tindak lanjut berpengaruh negatif terhadap penyelewengan terhadap anggaran pemerintah daerah dan berdampak positif akuntabilitas keuangan. Pada pengujian pengaruh langsung, hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan terhadap anggaran pemerintah daerah. Penelitian Cluster 2 yaitu Amir, Meldawati, Pratiwi, dan Zahra. Peneliti pada cluster 2 fokus pada bidang teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dengan hasil sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan pada nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Secara efek moderasi, hasilnya

menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Cluster 3 yaitu Furqan, Kahar, dan Tenripada.

**Tabel 1.** Jumlah Sitasi Artikel Per Tahun

| Tahun | $\geq 20$ | $\geq 10$ | $\geq 5$ | $\geq 1$ | 0  | Jumlah |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|----|--------|
| 2013  | 0         | 0         | 1        | 1        | 0  | 2      |
| 2014  | 1         | 0         | 0        | 1        | 0  | 2      |
| 2015  | 1         | 0         | 1        | 0        | 0  | 2      |
| 2016  | 0         | 1         | 0        | 1        | 1  | 3      |
| 2017  | 1         | 2         | 1        | 1        | 0  | 5      |
| 2018  | 0         | 2         | 1        | 4        | 1  | 8      |
| 2019  | 0         | 3         | 0        | 5        | 3  | 11     |
| 2020  | 2         | 3         | 2        | 8        | 3  | 18     |
| 2021  | 0         | 4         | 0        | 6        | 8  | 18     |
| 2022  | 0         | 4         | 0        | 8        | 9  | 21     |
| 2023  | 0         | 0         | 0        | 8        | 12 | 20     |

Sumber: Data yang Diolah (2023)

Tabel 1 menunjukkan berapa banyak artikel antara lain dikutip lebih dari 20 kali (atau sama dengan 20), lebih dari sepuluh kali (atau sama dengan 10), lebih dari lima kali (atau sama dengan 5) dan sekali (atau antara 1 dan 4) pada tahun yang relevan. Kolom paling kanan pada tabel menunjukkan jumlah publikasi tanpa kutipan. Tahun 2020 merupakan tahun yang memiliki sitasi paling bagus karena ada 2 artikel yang telah di sitasi lebih atau sama dengan 20 kali. Artikel dengan kutipan lebih dari 20 kali berjudul “*Addressing Corruption in Post-Soeharto Indonesia: The Role of the Corruption Eradication Commission*” dan “*Empowerment model for sustainable tourism village in an emerging country*”. Selanjutnya tahun 2021 dan 2022 memiliki kualitas bagus pada sitasi di atas atau sama dengan 10 dengan jumlah masing-masing 4 artikel. Peningkatan kutipan yang cukup signifikan dari setiap tahun menunjukkan penelitian akuntabilitas dan transparansi di Indonesia setiap tahun masih selalu berkembang untuk diteliti.

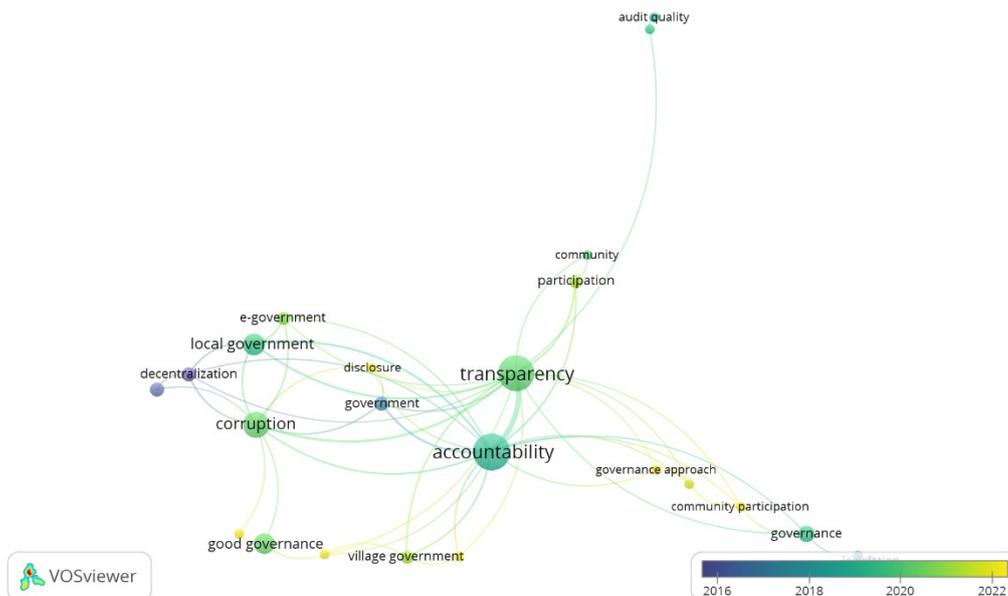
**Tabel 2.** Besar Artikel Kutipan Terbanyak

| Authors   | Title   | Year | Source title                                     | Cited by |
|---|---|------|--|----------|
| Friend R.; Jarvie J.; Reed S.O.; Sutarto R.; Thinphanga P.; Toan V.C. | Mainstreaming urban climate resilience into policy and planning; reflections from Asia  | 2014 | Urban Climate                                    | 66       |
| Harun H.; Van-Peursem K.; Eggleton I.R.C.                             | Indonesian public sector accounting reforms: Dialogic aspirations a step too far?   | 2015 | Accounting, Auditing and Accountability Journal  | 43       |
| Purnomo S.; Rahayu E.S.; Riani A.L.; Suminah S.; Udin U.              | Empowerment model for sustainable tourism village in an emerging country  | 2020 | Journal of Asian Finance, Economics and Business | 42       |
| Sofyani H.; Riyadh H.A.; Fahlevi H.                                   | Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance | 2020 | Cogent Business and Management                   | 41       |
| Susanty A.; Bakhtiar A.; Jie F.; Muthi M.                             | The empirical model of trust, loyalty, and business performance of the dairy  | 2017 | British Food Journal                             | 26       |

| Authors   | Title   | Year | Source title   | Cited by |
|---|---|------|--|----------|
| Umam A.K.; Whitehouse G.; Head B.; Adil Khan M.               | milk supply chain: A comparative study<br>Addressing Corruption in Post-Soeharto Indonesia: The Role of the Corruption Eradication Commission | 2020 | Journal of Contemporary Asia                               | 20       |
| Yanuardi Y.; Vijge M.J.; Biermann F.                          | Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia | 2021 | Extractive Industries and Society                          | 18       |
| Sumarsono R.B.; Triwiyanto T.; Kusumaningrum D.E.; Gunawan I. | Opportunities for the implementation of school-based management in the eastern area of Indonesia  | 2019 | International Journal of Innovation, Creativity and Change | 18       |
| Hartanto D.; Dalle J.; Akrim A.; Anisah H.U.                  | Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia              | 2021 | Digital Policy, Regulation and Governance                  | 16       |
| Pujiyono; Wiwoho J.; Sutopo W.                                | Implementation of Javanese traditional value in creating the accountable corporate social responsibility                                      | 2017 | International Journal of Law and Management                | 16       |

Tabel 2 merangkum sepuluh artikel teratas yang dikutip berdasarkan data skor kutipan global. Temuan Harun., et, al (2015) menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan kemajuan ekonomi dan politik yang signifikan reformasi yang bertujuan untuk mengembangkan demokrasi, memperkuat akuntabilitas, dan menciptakan transparansi dalam kaitannya dengan praktik sektor publik. Sebagai bagian dari reformasi, akuntansi akrual sekarang wajib, audit independen dilakukan, dan pengungkapan diwajibkan oleh kantor pemerintah ditingkat pusat dan daerah. Menurut Sofyani, et, al (2020) bahwa budaya kepatuhan teknologi informasi berhubungan dengan kualitas layanan, akuntabilitas, dan transparansi secara tidak langsung melalui penggunaan teknologi informasi yang efektif. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi informasi pemerintah yang efektif merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan untuk mencapai keberhasilan pengembangan e-government di pemerintah daerah di Indonesia.

Umam, et., al. (2020) mengemukakan Pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama pasca Soeharto di Indonesia dengan demokratisasi, liberalisasi pasar, dan kerangka kelembagaan anti-korupsi yang diupayakan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah. Upaya ini merupakan salah satu dorongan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi yang banyak terjadi di Indonesia. Menurut Hartanto et., al. (2021) bahwa sikap yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan berpengaruh terhadap harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka ketika didapatkan banyak kasus korupsi karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



**Gambar 2.** Overlay Visualization dari Topik Penelitian  
 Sumber: Data yang Diolah, 2023

Gambar 2. Menunjukkan *overlay visualization* dari kata kunci yang berkaitan dengan transparansi. Ditemukan 24 kata kunci yang saling berkaitan dari total 114 artikel yang digunakan pada penelitian ini. Gambar 2 menunjukkan tiga kata dominan yang muncul yaitu *transparency*, *accountability*, dan *corruption*. Dari 24 kata kunci yang telah diolah di VOSViewer maka dibagi menjadi 7 cluster kata kunci saling berkaitan yang telah dijabakan pada Tabel 2.

**Tabel. 2.** Cluster Kata Kunci

| Name                  | Concept   |
|-----------------------|---|
| Cluster 1 (Merah)     | <i>Community partitipation, governance, governance approach, legislation, local participation, policy</i> |
| Cluster 2 (Hijau Tua) | <i>Corruption, decentralization, democracy, e-government, local government</i>                            |
| Cluster 3 (Biru)      | <i>Community, participation, transparency</i>   |
| Cluster 4 (Kuning)    | <i>Goood governance, public trust, village fund</i>   |
| Cluster 5 (Ungu)      | <i>Accountability, competence, village government</i>   |
| Cluster 6 (Tosca)     | <i>Disclosure, government</i>   |
| Cluster 7 (Orange)    | <i>Audit quality, tax avoidance</i>   |

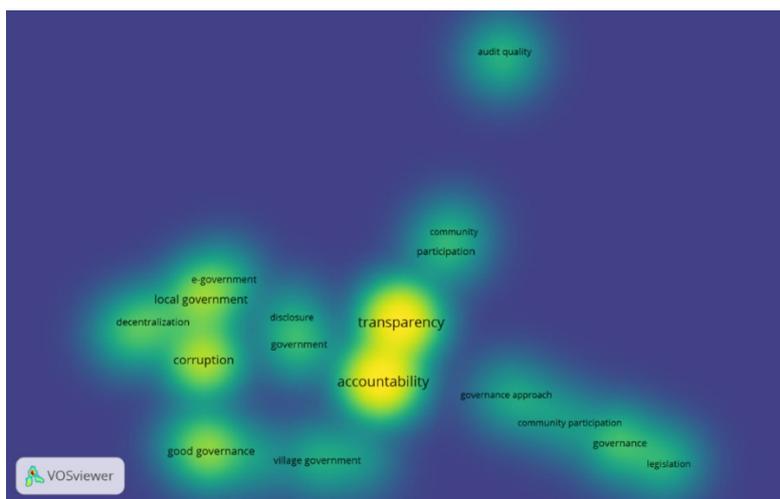
Sumber: Data yang Diolah, 2023

Berdasarkan data cluster pada tabel 2 terdapat kata kunci yang sering terulang yaitu “*government*” dan “*governance*”. Hal itu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia sangat berhubungan dengan pemerintah. Keterkaitan kata kunci didukung penelitian Putri et al., (2023) yang mengemukakan tiga permasalahan utama yang berkontribusi terhadap buruknya tata kelola dan kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, lemahnya penerapan pengendalian internal, buruknya perkembangan teknologi informasi, tidak adanya standar akuntansi dan konflik antar peraturan tata kelola yang ada saat ini. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pegelolaan lapoaran keuangan hal ini sesuai dengan tujuan mendorong desa melakukan aksi bersama atau bergotong royong sebagai satu kesatuan pemerintah desa Savitri et al., (2022).

Kata kunci berkaitan dengan transparansi muncul di cluster 3 yaitu *Community, participation*, dan *transparency*. Menurut Adiputra, et., al. (2018) opini audit dan lingkungan politik pemerintah daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi laporan keuangan, namun reaksi pemerintah daerah terhadap peraturan tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Transparansi melalui website merupakan salah satu media masyarakat dalam berpartisipasi untuk menilai dan meninjau kinerja pemerintah (Ritonga & Syahrir, 2016).

Akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan cluster 5 sering berhubungan dengan *competence* dan *village government*. Menurut Savitri et al., (2022) kompetensi aparat pengelola dana desa dapat mengurangi kendala selama proses pengelolaan dana desa. Kompetensi pegawai akan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kualitas hasil laporan yang disajikan. Purnawati dan Hatane (2020) mengemukakan laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas kepada public yang mencerminkan atas kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas, dan pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.



**Gambar 3.** *Density Visualitation*  
Sumber: Data yang Diolah, 2023

Gambar 3 menunjukkan bahwa faktor yang mendominasi paling besar berkaitan dengan transparansi yaitu akuntabilitas dan korupsi. Menurut Prasetya, dkk. (2013) penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten seperti transparansi dan akuntabilitas dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dapat berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan nepotisme sebagai strategi Tindakan pencegahan dan penindakan sehingga nantinya pemerintahan akan berjalan efektif. Transparansi juga digunakan untuk menilai berapa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Apabila dalam hal ini pemerintah tidak melakukan transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat dapat menurun. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Budiati, dkk. (2019) bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, ciri-ciri kualitatif laporan keuangan pemerintah yang menjadi prasyarat normatif sebagaimana tercantum dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain: Relevan, jika informasi tersebut mempunyai manfaat, dengan tindakan yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan. Dapat diandalkan, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari gagasan yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Comparable, artinya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dapat dimengerti, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunanya dan dinyatakan dalam istilah dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.

Penelitian transparansi dan akuntabilitas yang berkembang setiap tahun akan memberikan kontribusi lebih terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga akan tercipta pembangunan

berkelanjutan hingga tercapai tatanan ekonomi dan sosial. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi merupakan hal yang wajib dilakukan agar tercipta demokrasi yang berjalan dengan baik. Apabila transparansi dan akuntabilitas bisa berjalan dengan baik kepercayaan masyarakat menyerahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah juga akan meningkat.

## KESIMPULAN

Perkembangan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *good governance*. Penerapan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap besar kecilnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Studi ini berkontribusi bagi literatur transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 24 kata kunci yang terbagi dalam 7 cluster dari 114 artikel yang telah diidentifikasi berhubungan dengan tema transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan visualisasi VOSViewer dapat diketahui juga topik dominan lain yang berkaitan dengan perkembangan transparansi dan akuntabilitas yaitu korupsi, *good governance*, dan *participation*. Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip dalam mencapai *good governance*. Implementasi tersebut perlu melibatkan partisipasi yang bisa didapatkan dari masyarakat untuk meninjau dan mengawasi kinerja pemerintah yang akhirnya kasus korupsi menjadi berkurang dan tercipta tata Kelola pemerintahan yang baik.

Keterbatasan pada penelitian ini saat ini hanya mengkaji dari database Scopus sehingga kemungkinan artikel yang diamati belum mencerminkan bagaimana transparansi di semua daerah di Indonesia. Penelitian kedepan dapat memperluas *scope* penelitian dari google scholar atau referensi jurnal lain yang bereputasi untuk melakukan kajian *bibliometric*.

## REFERENSI

- Abdullah, M. I., Sudirman, S., Masdar, R., Din, M., & Firman, M. F. (2022). Antecedents of the Accountability in Indonesian Local Government Financial Reporting. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 7(5), 10.
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123-138.
- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Azahari, A. Y. P., & Sulardi, S. (2021). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Ukuran Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 294-304.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2019). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(4), 425-444.
- Friend, R., Jarvie, J., Reed, S. O., Sutarto, R., Thinphanga, P., & Toan, V. C. (2014). Mainstreaming urban climate resilience into policy and planning; reflections from Asia. *Urban Climate*, 7, 6-19.
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 228250.
- Hakim, L., Agustan, T. J., & Rangkuti, S. (2022). Analysis Of Factors Affecting Village Financial Accountability (Study On Villages in Batang Kuis And Percut Sei Tuan District). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 087-103.

- Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 23(6), 598-616.
- Harun, H., Van-Peursem, K., & Eggleton, I. R. (2015). Indonesian public sector accounting reforms: dialogic aspirations a step too far?. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(5), 706-738.
- Iyoha, F. O. (2012). Company attributes and the timeliness of financial reporting in Nigeria. *Business intelligence journal*, 5(1), 41-49.
- Nurindahsari, R., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2022). The Influence of Implementation E-Government Information System on Transparency and Accountability of Regional Financial Management (Case Study on Bandung City Government) Rendra Trisyanto. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251–257.
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298-308.
- Prasetya, H. B., Achmad, S., & Fuad, A. (2013). Akuntabilitas Dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi (Vol. 2, Issue 3).
- Pratiwi, M. E., Din, M., Masdar, R., Amir, A. M., Zahra, F., Kahar, A., & Meldawati, L. (2022). Utilization of information technology to increase human resources capacity and internal control systems on local government financial reporting information. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 28, 1-11.
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2023). Creating good village governance: an effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime*.
- Purnamawati, I., & Hatane, S. E. (2020). Analysis of Local Government Financial Information Quality Based on Internal and External Factors (Doctoral dissertation, Petra Christian University)
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(11), 74-80.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 110.
- Saarikallio, S., & Erkkila, J. (2007). The Role of Music in Adolescents' mood Regulation. *Sage Journals*, 35(1), 23–33.
- Savitri, E., Andreas, A., Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2022). Accountability Of Village Fund Management In Riau Province. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 131-138.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1735690.
- Sutaryo, S., & Amanu, K. T. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan?. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43-60.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British journal of management*, 14(3), 207-222.
- Umam, A. K., Whitehouse, G., Head, B., & Adil Khan, M. (2020). Addressing corruption in post-Soeharto Indonesia: The role of the corruption eradication commission. *Journal of Contemporary Asia*, 50(1), 125-143.
- Yanuardi, Y., Vijge, M. J., & Biermann, F. (2021). Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 8(3), 100905.